

PENGARUH PENDIDIKAN TERHADAP KEHIDUPAN KELUARGA

Syamsul Hadi Thubany

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Jakarta

Alamat Email : cak_hadi@yahoo.co.id

Abstract

The presence of educational institutions (schools) are functionally has adversely affected the family as the pattern of relationships among members, roles and functions as well as life style. Some of the most striking is the pattern of the child and parent relationship, in which the authority of parents in educating children mostly have taken over the school. So, come up emancipation of women who dared to break the patriarchal culture, and the independence of the nuclear family that does not want to be intervened by a extended family. It is important that the phenomenon of changes in the family's social formation in turn would affect the social structure in which the jib is one of a family unit.

Key words: Education, Family, Emancipation of Women, and Change of the Structure.

Intisari

Hadirnya lembaga pendidikan (sekolah) secara fungsional telah mempengaruhi kondisi keluarga seperti pada pola relasi antaranggota, peran dan fungsi maupun gaya hidup. Beberapa hal yang paling mencolok adalah pola hubungan anak dan orang tua, dalam mana otoritas orang tua dalam mendidik anak sebagian telah diambil alih sekolah. Kemudian munculnya emansipasi perempuan yang berani mendobrak budaya patriakal, serta independensi keluarga inti yang tidak mau diintervensi oleh keluarga besar. Penting diketahui bahwa fenomena perubahan pada formasi sosial keluarga ini pada giliranya tentu akan

mempengaruhi struktur sosial masyarakat di mana salah satu unit penopangnya adalah keluarga.

Kata Kunci: Pendidikan, Keluarga, Emansipasi Wanita dan Perubahan Struktur

Pendahuluan

Pendidikan sangat mempengaruhi kehidupan manusia dan keluarganya. Dapat dikatakan bahwa pendidikan adalah kebutuhan manusia sepanjang hayat. Pendidikan sangat penting artinya, sebab tanpa memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang cukup --yang diperoleh melalui proses pendidikan-- manusia akan menemukan kesulitan dalam mengembangkan diri dan keluarganya. Pembinaan keluarga membutuhkan pendidikan. Oleh karena itu rendahnya kejahteraan suatu keluarga biasanya akan berbanding lurus dengan kualitas pendidikan anggota keluarga yang rendah pula. Keluarga adalah wahana yang sangat urgen di antara individu dan kelompok dan merupakan kelompok sosial (*social group*) di mana anak-anak mulai berinteraksi dan menjadi anggotanya. Dalam kehidupan keluarga anak-anak untuk pertama kalinya mendapatkan sosialisasi kehidupan bersama anggota yang lain. Ibu, ayah dan saudara-saudaranya serta keluarga-keluarga yang lain adalah orang-orang yang pertama kali menjalin kontak sosial dengan anak sekaligus mengajarkan pada anak nilai-nilai luhur kehidupan serta keadaban terkait bagaimana ia hidup bersama orang lain. Sampai anak-anak memasuki jenjang pendidikan sekolah, mereka telah menghabiskan seluruh waktunya di dalam unit keluarga.¹

Secara definitif keluarga merupakan unit sosial terkecil yang sangat menentukan dinamika suatu komunitas. Ini berarti bahwa maju-mundurnya komunitas tergantung seberapa besar kontribusi keluarga dalam mewarnai kehidupan komunitas tersebut. Pada umumnya keluarga yang dapat berkontribusi (baca: mewarnai) lingkungan sosialnya adalah keluarga berpendidikan. Sekedar contoh, munculnya orang-orang yang merepre-sentasikan kelompok masyarakat dan memiliki otoritas dalam pemerintahan atau sebagai penentu kebijakan merupakan produk dari keluarga yang terdidik dengan baik sehingga mereka memiliki kapasitas dan integritas dalam menjalankan tugasnya. Dalam artian, prestasi seseorang sangat ditentukan oleh kapasitas diri setelah ia memperoleh kemajuan dalam

¹ Lihat selengkapnya dalam Abu Ahmadi, "*Sosiologi Pendidikan*", Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

pendidikan.

Dengan keunggulan SDM yang dimiliki, tidak sedikit di dunia ini negara yang jumlah penduduknya di bawah penduduk Pulau Bali tapi karena memiliki kelebihan di bidang SDM, maka negara tersebut menjadi disegani oleh bangsa-bangsa lain yang justru jumlah penduduknya lebih banyak dan memiliki kedaulatan teritorial lebih luas. Bahkan kedigdayaan suatu bangsa juga ditunjukkan akan kualitas pendidikan warganya yang unggul. Meskipun tidak memiliki sumberdaya alam yang berlimpah, tapi karena didukung oleh sumberdaya manusia yang handal maka negara tersebut bisa menjadi sangat makmur dan penduduknya semakin sejahtera. Dalam konteks ini dapat kita lihat negara tentangga Singapura, ² Jepang dan Korea Selatan ketiganya minim sumberdaya alam dibandingkan negara kita. Bahkan Singapura yang tak punya sawah dan tambang batu bara penduduknya tak pernah kekurangan pangan dan krisis energi. Negara itu jelas mengandalkan kualitas SDM-nya. Kebijakan menggenjot pendidikan berkualitas bagi warganya telah berbuah kemakmuran.³

Makalah berikut ini akan membahas tentang pengaruh atau konsekuensi-konsekuensi logis pendidikan terhadap kehidupan keluarga. Untuk memahami fokus permasalahan dan pengembangan analisis penulis merujuk pada pemikiran Robert O. Blood yang menyatakan bahwa lembaga pendidikan dengan transformasi pengetahuan baru serta norma-norma dan nilai-nilai dasar kehidupan dapat bersaing dengan lembaga keluarga, bahkan dapat mempengaruhi perilaku anggotanya. Ia pun kembali menegaskan, institusi pendidikan (sekolah) dengan pengetahuan dan ide-ide baru yang ditransmisikan kepada peserta didik (anak) mengandung konsekuensi-konsekuensi yang menjadi "gangguan" terhadap eksistensi keluarga, yaitu: (i) memberikan pembebasan pada sebagian anak sehingga menimbulkan "persaingan otoritas" antara orang tua dan sekolah; (ii) mendorong emansipasi perempuan yang membuat ia semakin kritis dan tidak mudah tunduk pada budaya patriarki dan (iii) munculnya kebebasan keluarga inti (*nuclear family*) dari jebakan pengaturan oleh keluarga

2 Di negara-negara yang tergolong maju di kawasan ASEAN Indonesia berada dalam deretan yang terakhir. Singapura menduduki peringkat pertama di ASEAN untuk kualitas manusianya dengan nilai IPM/HDI 0,866. Disusul Brunei Darusalam dengan nilai IPM 0,838, Malaysia dengan IPM 0,761, Thailand 0,682, dan Filipina 0,644. Selengkapnya dapat diakses pada laman, dalam http://www.Suara_pembaruan.com/eko-nomidanbisnis, **diunduh pada Sabtu, tanggal 28 Desember 2013, pukul: 11.25 Wib.**

3 Disarikan berdasarkan publikasi majalah Tempo, edisi: 20 – 26 Agustus 2012.

besarnya. Fenomena *external system* ini tentu saja cenderung untuk mengubah hubungan sosial di antara anggota keluarga; relasi antara suami-istri, anak dengan orang tua dan keluarga inti dengan keluarga besar (*extended family*).⁴

Buah pikir Blood tersebut apabila dirunut sejalan dengan teori fungsionalisme-struktural, sebagaimana dikatakan Durkheim bahwa manusia dalam kesamaan waktu ia bukan hanya dilahirkan dalam konteks lingkungan fisik saja, melainkan berbarengan dengan lingkungan sosial (*melieu social*). Lingkungan itu berasal dari masa lampau manusia dan terdiri dari tradisi-budaya berupa tata nilai, tata kepercayaan, ketrampilan, pola-pola perilaku dan pranata pendidikan. Lingkungan sosial tidak hanya membuat kondisi-kondisi, tetapi juga merumuskan tujuan-tujuan dan norma-norma kelakuan yang dikenakan kepada manusia dalam melakoni kehidupannya.⁵ Itulah yang disebut Durkheim sebagai struktur sosial yang senyatanya dialami tiap-tiap manusia (baca: realitas sosial).

Realitas sosial merupakan struktur-struktur masyarakat, negara dan keluarga, nilai-nilai seperti kedaulatan, agama, adat-istiadat, norma-norma kesusilaan atau pun kearifan lokal. Sehubungan dengan pengaruh-pengaruh *melieu social* itu mereka berada baik *di luar* maupun *melalui* dan *di dalam* individu. Ia terus berproses dan selalu menyertai daur tindakan sehari-hari individu dan kelompok. Bahwa unsur-unsur pokok kebudayaan dan struktur sosial tersebut diinternalisasikan atau dibatinkan oleh tiap-tiap individu dan pada akhirnya menjadi bagian kepribadiannya. Karenanya, tindakan manusia tidak bisa lepas dari struktur sosial yang melingkupinya.⁶

Dalam konteks ini Sanderson menegaskan, fungsionalisme memandang peran penting *melieu social* (struktur) seperti pola-pola perilaku, tata kepercayaan, tata nilai, hukum, pranata pendidikan, pengalaman masa lalu atau sejarah telah menjadi prasyarat fungsional dalam mempengaruhi tindakan individu maupun kelompok.⁷ Dalam arti kata, pendekatan fungsional berasumsi bahwa individu anggota keluarga bertindak sesuai dengan seperangkat norma dan nilai, yang telah disosialisasikan dalam cara yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari sistem sosial yang bersangkutan, bahkan diyakini tindakan-tindakan yang independen jarang terjadi dan sifatnya adalah

4 Robert O. Blood, "The Family", New York: The Free Press, 1972.

5 K.J. Veeger, "Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individu-Masyarakat Dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi", (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 142.

6 *Ibid*, hlm. 143.

7 Stephen, K. Sanderson, "Makro Sosiologi: Sebuah Pendekatan Sebuah Realitas Sosial", (Jakarta: Rajawali Press), 2000, hlm., 488-489.

asosial. Satu contoh kasus yaitu, mengapa perempuan –yang kalau di rumah adalah seorang ibu rumah tangga— di ranah publik ia mampu berperan dalam pengambilan keputusan di jajaran elite pemerintahan? Hal ini tentu tidak bisa dipisahkan dengan latar belakang pendidikan seseorang sehingga memiliki kemampuan lebih atau profesionalitas di bidang pemerintahan. *External system* atau pranata pendidikan itulah yang menjadi lantaran seseorang dapat berkarya secara profesional.

Pendek kata, paparan teori di atas berusaha untuk menjelaskan sifat pendidikan dan pengaruhnya terhadap dinamika kehidupan unit keluarga di Indonesia, sebagai akibat adanya persyaratan fungsional pendidikan dalam suatu kehidupan masyarakat modern, yaitu masyarakat yang beralih dari budaya agraris ke budaya industrial.

Hadirnya Institusi Pendidikan (Sekolah)

Pendidikan adalah sistem budaya atau instruksi intelektual yang formal atau semiformal (non formal). Meski dalam pengertian ini pendidikan dikatakan merupakan suatu ciri masyarakat manusia yang universal.⁸ Sebab, di belahan dunia manapun proses pendidikan selalu terjadi sehingga entitas sebuah masyarakat melalui sejarah dan kebudayaannya dapat diwariskan secara turun-temurun dari generasi kepada generasi berikutnya. Kontinuitas pewarisan inilah pada suatu masa membentuk peradaban manusia yang khas dan unik.

Sekolah merupakan tempat pengembangan kepribadian dan pengetahuan serta nilai-nilai baru bagi anak setelah keluarga. Di sekolah anak-anak belajar pengetahuan dan ketrampilan khusus di samping diajari budi pekerti agar anak tumbuh menjadi insan yang intelek sekaligus berakhlak mulia. Lain lagi kalau di rumah, orang tua biasanya hanya terbatas mengajarkan adab kesusilaan atau budi pekerti. Dan selebihnya, lalu komunitaslah yang ikut membentuk kepribadian anak-anak. Menurut Muhammad Athiyah Al-Abrasy, bahwa keluarga, sekolah dan komunitas disebut sebagai tiga pusat pendidikan yang sangat berperan penting membentuk kepribadian dan sikap mental anak kelak setelah dewasa.⁹

Sebelum didirikan lembaga pendidikan formal yang disebut sekolah, sejak zaman Hindu-Budha, masyarakat Indonesia telah mengenal pendidikan manggala. Pendidikan manggala adalah pendidikan yang dikhususkan untuk mendidik para calon kesatria,

⁸ *Ibid*, hlm. 487.

⁹ Muhammad Athiyah Al-Abrasy, "*Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*", Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987.

yaitu pendidikan bagi putra-putri raja dan pejabat elite kerajaan seperti yang diselenggarakan pada kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Para murid yang belajar di tempat ini disebut cantrik sedangkan gurunya disebut resi. Seorang resi yang mengampu pendidikan di manggala mengajarkan budi pekerti, ilmu politik (tata pemerintahan) di samping ilmu olah-kanuragan atau yang disebut ilmu magis-supranatural. Pada umumnya, anak-anak yang dididik di lembaga manggala adalah anak-anak raja dan para keturunan bangsawan lainnya. Mereka kelak sengaja dipersiapkan sebagai pemimpin politik atau pejabat kerajaan. Kemudian pada perkembangan berikutnya, model pendidikan manggala di zaman Islam diadopsi menjadi pendidikan pesantren. Di mana para murid yang belajar dinamakan santri sedangkan sang guru disebut kiai.¹⁰

Harus diakui, bahwa hadirnya sistem pendidikan formal (baca; umum) di Tanah Air karena adanya kepentingan penjajah Belanda yaitu munculnya politik etis.¹¹ Salah satu pengaruh peradaban Belanda atas struktur budaya bangsa kita adalah pendidikan umum model Barat-Belanda. Sistem pendidikan Belanda hingga hari ini "bersaing" dengan sistem pendidikan asli Indonesia yang umumnya berupa lembaga pengantrikan (mandala) atau pondok pesantren, --meski demikian pendidikan bercorak tradisional ini terus mengalami transformasi yakni terus dimodernisasi baik pada aras institusi ataupun metode pengajarannya, sehingga muncul istilah pondok pesantren modern seperti pesantren Darussalam Gontor, Darun Najah, Tebuireng, Ash-Shidiqiyah dan Manbaus Sholihin..

Tujuan penyelenggaraan pendidikan formal (sekolah Belanda) pertama-tama dimaksudkan untuk melayani hasrat intelektual, kecakapan membaca dan menulis dan mengenal budi pekerti bagi anak-anak warga keturunan Belanda yang tinggal di wilayah Hindia Belanda dan anak-anak dari keluarga priyayi di samping sebagai sarana menyebarkan agama Kristen. Sekolah pertama bagi anak Belanda dibuka di Jakarta pada tahun 1817 yang segera diikuti pembukaan sekolah di kota-kota lain di Jawa. Kemudian pada tahun 1820 Gubernur Jenderal *Van der Capellen* (1819-1823) mengintruksikan regen-regen untuk menyediakan sekolah untuk anak-anak pribumi, tetapi hingga tahun 1849 hanya dua sekolah yang didirikan oleh regen yang aktif.¹²

10 Lihat, Nurcholish Madjid, "*Bilik-Bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan*", Jakarta: Paramadina, 1997. Bandingkan dengan tulisan Haris Daryono Ali Haji, "*Dari Majapahit Menuju Pondok Pesantren*", (Yogyakarta: Bagaskara, 2009), hlm. 171-174.

11 Parakriti T.Simbolon, "*Menjadi Indonesia*", (Jakarta: Kompas, 1995).

12 S. Nasution, "*Sejarah Pendidikan Indonesia*", (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm.31

Dalam perkembangannya, selanjutnya Nasution menuturkan,¹³ setelah tahun 1848 baru dikeluarkan peraturan-peraturan oleh pemerintah Hindia Belanda yang menunjukkan perintah lambat laun menerima tanggung jawab yang lebih besar atas pendidikan anak-anak pribumi sebagai hasil perdebatan di parlemen Belanda dan mencerminkan suatu sikap liberal yang menguntungkan terhadap rakyat Indonesia. Perdebatan sengit yang terjadi di parlemen Belanda dipicu oleh kasus terbongkarnya sistem tanam paksa yang dalam prakteknya semakin menyusahkan kondisi masyarakat pribumi. Lalu muncul peraturan pemerintah tahun 1854 yang mengintruksikan Gubernur Jendral untuk mendirikan sekolah dalam tiap kabupaten bagi pendidikan anak pribumi. Peraturan tahun 1863 mewajibkan Gubernur Jendral untuk mengusahakan terciptanya situasi yang memungkinkan penduduk bumi putera pada umumnya menikmati pendidikan. Sistem tanam paksa dihapuskan pada tahun 1870 dan digantikan dengan undang-undang Agraria 1870.

Pada tahun itu di Indonesia timbul masalah baru dengan adanya undang-undang Agraria dari *De Waal*,¹⁴ yang memberikan kebebasan pada pengusaha-pengusaha pertanian partikelir. Usaha-usaha perekonomian makin maju, masyarakat lebih banyak lagi membutuhkan pegawai. Sekolah-sekolah yang ada dianggap belum cukup untuk memenuhi kebutuhan akan pegawai. Itulah sebabnya maka usaha mencetak calon-calon pegawai semakin dipergiat lagi. Kini tugas departemen adalah memelihara sekolah-sekolah yang ada dengan lebih baik dan mempergiat usaha-usaha perluasan sekolah-sekolah baru. Pada tahun 1893 timbulah diferensiasi pengajaran bumi putera, tentu anak dari kalangan priyayi Jawa dibedakan sekolahnya dengan anak dari kalangan non priyayi atau rakyat biasa. Di era kolonial ini segregasi sosial dalam pendidikan terjadi di antara anak-anak penduduk bumi putra dan warga negara asing, antara kalangan priyayi dan warga negara biasa.

Berangkat dari latar historis lembaga pendidikan (sekolah) di Tanah Air maka dalam perkembangan berikutnya muncul istilah dikotomi pendidikan, yaitu pandangan yang membedakan antara kualifikasi keilmuan sekolah yang bersifat keagamaan dan sekolah umum. Padahal, sebenarnya istilah dikotomi pendidikan adalah sebuah rekayasa dalam 'politik pendidikan' yang justru sumber masalahnya diciptakan oleh penjajah Belanda.¹⁵ Alasan yang lain

13 *Ibid*, hlm. 32.

14 Simbolon, *op.cit*, hlm.45

15 Bahkan di sekolah yang didirikan Belanda dikenal adanya perbedaan

adalah, sistem *among* yang diterapkan dalam pendidikan pesantren juga diterapkan pada pendidikan Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantoro, tokoh pendidikan nasional. Menurut Ki Hajar, pendidikan sistem *among* yaitu membangun pendidikan di sekeliling peserta didik dengan secara maksimum memanfaatkan nalurinya untuk membangun diri, atau pendidikan yang berpusat pada anak didik itu sendiri. Penerapan metode ini diharapkan anak didik semakin mengenali dan mampu mengembangkan potensi diri dan budayanya. Karena pada dasarnya sistem *among* itu sejatinya mengandung persatuan hakiki dengan kebudayaan Indonesia.¹⁶

Dengan demikian sesungguhnya tidak ada alasan untuk mengatakan telah terjadi dikotomi dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Sebab, pada dasarnya pendidikan baik yang bercorak keagamaan maupun yang non keagamaan sama-sama ditujukan untuk menyiapkan anak-anak menjadi orang dewasa yang memiliki bekal pengetahuan, keahlian khusus dan berbudi pekerti luhur sehingga dalam pekungannya nanti anak menjadi manusia merdeka, mandiri dan berkarakter. Inilah yang disebut *human touch*.¹⁷ Oleh karena itu suatu tindakan dikatakan mendidik apabila tindakan tersebut benar-benar membawa anak pada taraf (*level*) insani. Taraf

kelas sosial atau dualisme pendidikan. Seperti yang ditulis Nasution (2001), untuk mengatur dasar-dasar baru bagi pengajaran masyarakat bumi putra, keluarlah *indischstaatsblad* pada tahun 1893 dengan nomor 125 yang membagi sekolah bumi putra menjadi dua bagian: (a) Sekolah-sekolah kelas I untuk anak-anak priyai dan kaum terkemuka dan (b) Sekolah-sekolah kelas II untuk rakyat jelata. Pengkategorian model pendidikan ini bertujuan untuk memenuhi kepentingan penjajah. Misalnya, perbedaan sekolah kelas I dan kelas II antara lain: Kelas I Tujuannya: untuk memenuhi kebutuhan pegawai pemerintah Hindia Belanda, perdagangan dan perusahaan. Lama bersekolah lima tahun. Mata pelajaran yang diajarkan meliputi: membaca, menulis, berhitung, ilmu bumi, sejarah, pengetahuan alam, menggambar, dan ilmu ukur. Guru-guru yang mengajar adalah keluaran *Kweekschool*. Sedangkan bahasa pengantar yang digunakan dalam proses belajar mengajar yaitu Bahasa Daerah/Melayu.

16 Lihat David Radcliffe, "*Ki Hajar Dewantara dan Sekolah Taman Siswa*", dalam Nat J. Colletta & Umar Kayam (pen.), "**Kebudayaan dan Pembangunan**", (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987). Dalam tema yang sama Prof. Dr. Ki Supriyoko juga menulis artikel dengan judul "*Pentingnya Roh Pendidikan*", dalam Kompas, edisi: 19/03/2003.

17 Dalam konteks pendidikan Islam, sebagaimana dikemukakan Al-Abrasy, bahwa tujuan pendidikan Islam adalah mencapai akhlak yang sempurna (baca; insan kamil). Pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah jiwa pendidikan Islam, yaitu dengan mendidihkan *akhlakul karimah* dan jiwa merdeka pada peserta didik (anak), menanamkan rasa *fadhilah* (keutamaan), membiasakan mereka dengan adab kesopanan yang tinggi dan sportifitas, termasuk mempersiapkan mereka untuk suatu kehidupan yang suci seluruhnya, dan tak lupa menanamkan sikap ikhlas dan jujur. Maka tujuan pokok dan yang paling utama daripada pendidikan Islam ialah mendidik budi pekerti dan pendidikan jiwa. Periksa, Muhammad Athiyah Al-Abrasy, "*Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*", (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987).

insani adalah lapisan fundamental pada nurani manusia, atau akar-akar hidup kita sebagai manusia yang berjiwa merdeka.¹⁸

Sejatinya, misi pendidikan Indonesia yaitu mencetak manusia beriman sekaligus berjiwa nasionalis yang teguh pada keyakinan agama serta misi keagamaan yang profetik. Manusia-manusia terdidik seperti inilah yang sesungguhnya memiliki daya tarik mengembangkan solidaritas bangsa karena dia berusaha hidup sebagai warga negara Indonesia yang menghiasi tingkah lakunya dengan kebajikan-kebajikan yang didiwujudkan sebagai *civic virtue*.¹⁹ Menurut Ignas Kleden yang dimaksud *civic virtue* adalah kesanggupan seseorang untuk hidup dalam keragaman pendapat serta perbedaan pandangan dan sikap hidup, serta kematangan kepribadian untuk menguasai, mengendalikan egoisme dan fanatisme sendiri, kesempatan untuk beraktualisasi diri dan menyatakan pendapat sendiri secara bertanggung jawab dan kesediaan untuk melakukan kompromi dengan cara-cara yang rasional.²⁰

Apapun model sekolah yang dimasuki para peserta didik, yang jelas tidak bisa dipungkiri bahwa pengetahuan dan nilai baru yang kemudian melekat pada jiwa anak sekaligus mempengaruhi perilaku mereka diperoleh melalui; (1) interaksi dalam proses belajar yang dilakukan oleh pendidik (guru); (2) transmisi materi-materi pelajaran sebagaimana yang telah dirancang berdasarkan kurikulum; dan (3) terjadinya interaksi dan kontak sosial dengan teman-teman sebaya di sekolah (*peer group*). Melalui interaksi dengan guru anak-anak banyak berdialog tentang berbagai hal dan semakin mempertebal minatnya untuk mendalami pengetahuan yang dipelajarinya. Selain itu dengan beragam fasilitas buku bacaan yang tersedia serta intensitas diskusi antar sesama teman belajar membuat daya kritis anak didik semakin terasah tajam. Perkembangan intelektual semacam inilah yang kadang tidak diimbangi oleh pengetahuan orang tua di rumah. Sehingga tak jarang mengakibatkan "jarak komunikasi" yang tak seimbang antara anak-anak dan orang tua mereka.

Dilihat dari perspektif demografi, Indonesia adalah bangsa yang relatif muda; sepertiga dari jumlah penduduknya di bawah usia 14 tahun. Jika program perluasan wajib belajar dari 9 tahun menjadi 12

18 N. Driyarkara, "Pendidikan Dan Peralihan Sosio Budaya" dalam Driyarkara *Tentang Pendidikan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1991).

19 Frans M. Parera, "Gerakan Pendidikan Alternatif Dalam Tafsir Pasca Mangunwijaya (1999 - 2007)", dalam Indratno, A. Ferry T., (Ed.), "Kurikulum Yang Mencerdaskan: Visi 2030 Dan Pendidikan Alternatif", (Jakarta: Kompas, 2007).

20 Seperti dikutip dalam Frans M. Parera, *Ibid.*, hlm.67.

tahun sebagaimana rencana program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan bisa dilaksanakan dengan baik dan sukses maka penduduk muda akan mendapat manfaat dari akses pendidikan. Seperti diterangkan menteri Muhammad Nuh, saat ini lama tahun belajar masyarakat Indonesia masih belum menembus angka sembilan tahun. Meskipun rata-rata lama tahun belajar anak-anak Indonesia sudah mengungguli negara Thailand, namun masih kalah dengan negara tetangga, Malaysia.²¹ Jadi, sangat wajar apabila secara ekonomi kesejahteraan warga Malaysia lebih tinggi dibandingkan rakyat Indonesia maupun Thailand. Selengkapnya, angka perbandingan rata-rata lamanya tahun belajar dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel.1. Rata-rata Lama Tahun Belajar dari Pelajar Sejumlah Negara

Nama Negara	Rata-rata lama tahun belajar anak berdasarkan tahun		
	1995	2005	2010
Amerika Serikat	12,6 tahun	12,9 tahun	13,1 tahun
Jepang	10,6 tahun	11,3 tahun	11,6 tahun
Korea Selatan	10,6 tahun	11,5 tahun	11,8 tahun
Malaysia	8,4 tahun	9,7 tahun	10,1 tahun
Filipina	7,9 tahun	8,6 tahun	9,0 tahun
Indonesia	6,0 tahun	7,3 tahun	7,9 tahun
Thailand	5,9 tahun	6,8 tahun	7,5 tahun

Sumber: Kemendikbud dalam Republika, Selasa, 31 Desember 2013.

Tentu saja peningkatan akses peningkatan pendidikan bagi anak-anak sebagai pewaris bangsa diharapkan dapat menciptakan apa yang diistilahkan oleh Menteri Muhammad Nuh sebagai “generasi emas”. Dapat dipastikan bahwa pengetahuan serta ketrampilan yang diperoleh dari masa perpanjangan belajar berpotensi meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan juga tingkat pendapatan tenaga kerja.²² Dengan pendapatan yang cukup kondisi kesejahteraan rumah tangga otomatis akan meningkat pula. Untuk itu partisipasi belajar siswa harus terus ditingkatkan disamping lamanya waktu belajar anak sehingga dapat mengejar ketertinggalan dengan negara Malaysia, syukur-syukur dapat menyamai prestasi bangsa Jepang.

²¹ Lihat, Republika, edisi: 31 Desember 2013.

²² Samer Al-Samarrai, “Sebuah Janji untuk “Generasi Emas” (Opini), Jakarta: Kompas, edisi: 10 September 2013.

Pengaruh Sekolah Terhadap Otoritas Keluarga

Dewasa ini peran pengasuhan keluarga terhadap anak-anak telah banyak berkurang sejak munculnya sekolah. Apalagi di zaman sekarang anak-anak yang masih usia balita sudah dimasukkan ke sekolah (*play group*). Di kota-kota dan di daerah-daerah semi urban, sebelum anak-anak memasuki sekolah dasar sudah terlebih dulu “dipersyaratkan” untuk masuk PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) atau Taman Kanak-Kanak. Dengan demikian semakin dini anak-anak memasuki lembaga sekolah secara otomatis mengurangi kuantitas hubungan anak dengan orang tua, apalagi kalau anak-anak mereka memasuki sekolah yang menerapkan sistem *full day school*, di mana anak-anak harus mengikuti proses belajar mengajar di lingkungan pendidikan sekolah hingga waktu siang atau sore hari. Tak jarang beberapa sekolah TK atau *play group* juga dapat berfungsi ganda yaitu sebagai tempat penitipan anak di samping tempat pembelajaran anak usia dini.

Keberadaan lembaga pendidikan TK atau *play group* ini menurut cara pandang struktural fungsional dinilai sebagai fungsi alternatif yang menggantikan peran orang tua dalam mengasuh anak-anak balita mereka. Karena kesibukan dan lain hal maka banyak orang tua di jaman modern ini cenderung menyerahkan tanggung jawab mendidikan anak-anak mereka kepada lembaga pendidikan formal. Pekerjaan-pekerjaan di bidang birokrasi pemerintahan, perkantoran swasta dan di tempat-tempat industri modern mensyaratkan ketentuan-ketentuan profesionalitas di bidangnya. Oleh sebab itu, menuntut disiplin kerja yang tinggi bagi para pegawai atau karyawan sehingga akan banyak menyita waktu orang tua untuk mendidik anak-anak mereka. Keadaan seperti ini yang membuat orang tua terpaksa tidak bisa meluangkan waktu untuk menemani anak-anak mereka dalam belajar.

Di kota-kota besar seperti Jakarta, bagi orang tua yang bekerja dengan durasi waktu yang hampir seharian sudah barang tentu tidak akan bisa berbuat banyak untuk menemani anak mengerjakan PR sekolah atau menonton televisi bareng anak. Paling-paling hanya pada saat akhir pekan orang tua bisa meluangkan waktu bermain dengan anak-anak mereka. Itu pun kalau anak-anak mereka masih tergolong belum menginjak usia remaja. Kalau anak-anak sudah masuk usia remaja dewasa biasanya mereka lebih memilih ke luar bersama teman-teman sabaya dari pada ikut berlibur bersama orang tuanya.

Di era globalisasi yang serba canggih ini penguasaan pengetahuan dan nilai-nilai baru yang dimiliki seorang anak tidak lagi dominan dari

orang tuanya seperti yang terjadi pada abad-abad yang lalu. Sekolah, lembaga pelatihan dan media massa adalah merupakan pemasok informasi yang semakin dominan terhadap kemampuan intelegensia dan ketrampilan anak di era digital ini. Dalam penguasaan *information technology* (IT) anak-anak muda sekarang jauh lebih *jago* dibandingkan para orang tua mereka, yang kadang malah terkesan gagap teknologi. Hal ini tentu saja akan berdampak pada pola relasi orang tua dan anak, sehingga tidak mudah bagi orang tua untuk mengatur atau menentukan keinginan anak sebagaimana yang terjadi dalam keluarga tradisional tempo dulu.

Nilai-nilai dan pengetahuan baru dari sekolah yang telah dicerna oleh anak juga dapat membangkitkan keberanian anak untuk mengkritik praktek tradisional orang tua bahkan menentangnya, meski tidak sedikit banyak generasi muda yang mencoba melakukan reinterpretasi tradisi supaya tidak ketinggalan zaman. Sebagai contoh adalah pengalaman seorang pekerja sosial, Butet Manurung yang mengajar di *Sokola Rimba* pada anak-anak Suku Anak Dalam yang berlokasi di Taman Nasional Bukit Duabelas di Propinsi Jambi. Setelah anak-anak orang rimba ini mendapatkan pendidikan *literacy* (pengetahuan baca-tulis-hitung) dan pengetahuan dasar lainnya di antara dari mereka telah mengalami perubahan perilaku khususnya dalam mensikapi tradisi yang sudah sejak lama dipraktikkan oleh komunitas mereka selama ratusan tahun.²³ Bahkan anak-anak muda Suku Kubu (sebutan lain orang rimba di Jambi) yang barangkali sudah "tercerahkan" itu mulai gelisah dan berani "memberontak" terhadap beberapa tradisi leluhur yang dirasa tidak efektif lagi dipraktikkan pada zaman mereka sekarang.

Anak-anak muda dari kalangan Suku Kubu di Jambi sekarang tidak lagi menjalankan tradisi *melangun*,²⁴ sebagaimana yang dulu dipraktikkan oleh leluhur mereka. Dahulu leluhur mereka melakukan tradisi *melangun* yaitu harus meninggalkan tempat bermukim lalu pindah mencari pemukiman baru hingga waktu yang sangat lama, kira-kira 5-7 tahun sebelum kembali lagi ke tempat semula. Dalam kondisi hutan yang terus menyempit karena dikonversi dan di mulainya tradisi menanam (padi, karet dan buah-buahan), membuat mereka tidak mau meninggalkan ladangnya dalam waktu yang lama,

23 Butet Manurung, "Pendidikan Pada Komunitas Orang Rimba di Kawasan Adat Bukit Duabelas Jambi", dalam Indratno, A. Ferry T., (Ed.), "Kurikulum Yang Mencerdaskan: Visi 2030 Dan Pendidikan Alternatif", (Jakarta: Kompas, 2007), hlm.53.

24 Tradisi dengan berpindah tempat selama beberapa tahun (nomadik) karena ada anggota keluarga yang meninggal dunia.

paling-paling hanya sekitar 1-2 tahun, itu pun mereka selalu memantau tempat tinggalnya yang baru supaya harta benda yang disimpan di rumah tidak hilang dicuri orang. Kini bahkan ada dari kalangan mereka yang *melangun* dengan mengendarai sepeda motor, ada juga yang menyewa kendaraan truk untuk mengangkut semua barangnya dan membuat hunian sementara yang dekat pasar agar lebih mudah kalau hendak berbelanja.²⁵

Contoh lain adalah, dengan pengetahuan yang diperoleh dari tempat pendidikan (sekolah) membuat anak-anak remaja sekarang semakin memahami arti pentingnya kesehatan reproduksi remaja (KRR). Survei membuktikan bahwa semakin lama ia mengenyam pendidikan di bangku sekolah maka semakin sadar dan memahami KRR.

Tabel 2. Pengetahuan Anak Terhadap Kesehatan Reproduksi

Latar Belakang Pendidikan	Laki-laki (%)	Perempuan (%)
Belum tamat SD	28,9	35,5
Tamat SD	30,7	28,9
Tamat SLTP	42,8	47,9
SLTP +	64,1	61,3

Diadaptasi dari Majalah Mira No. 001.0/25.01.0/-2005.

Sumber: Survei Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2002 - 2003 pada kelompok usia remaja 15 - 24 tahun, survei dilakukan di 15 provinsi (Riau, Sumsel, Lampung, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, DIY, NTB, Kalbar, Kalsel, Sulut, Sulsel, Banten dan Gorontalo).

Dari hasil survei tersebut tergambar pula seberapa dalam pengetahuan remaja (*youth*) tentang perubahan fisik yang terjadi di masa puber dan pengetahuan tentang penyakit animea. Rata-rata hasil survei juga menunjukkan angka yang menggembirakan, yaitu angka 80 persen, tapi ironisnya terdapat angka 57,1 persen di kalangan remaja putri adalah menderita gejala anemia yang akan berisiko menjadi penyebab pendarahan dan kematian jika mereka menikah, hamil dan melahirkan anak.²⁶

Menurut sumber data yang sama juga dijelaskan, bahwa pengetahuan mereka mengenai penyakit HIV/ AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS), sebanyak 80 persen remaja pernah mendengar dan sekitar 60 persen tahu dan bisa menyebutkan bagaimana cara menghindari

²⁵ Manurung, op.cit., hlm.54 .

²⁶ Mira Nomor: 001.0/25.01.0/-2005, berdasarkan data BPS tahun 2002-2003.

penyakit HIV/AIDS. Tetapi pengetahuan mereka tentang IMS justru menunjukkan angka yang sangat rendah, di mana dua di antara tiga cewek dan enam di antara sepuluh cowok saja yang pernah mendengar istilah IMS dan bahkan mereka juga tidak tahu mengenai gejalanya. Melihat gejala ini semestinya orang tua harus selalu waspada kepada anak-anak mereka supaya mereka tidak terjerembab ke dalam lembah nista atau pergaulan bebas. Sebab resiko terbesar dari penularan penyakit HIV/AIDS adalah faktor yang diakibatkan oleh gonta-ganti pasangan.

Dengan meningkatnya angka partisipasi pendidikan yang dicapai oleh anak yakni dengan lamanya menempuh masa belajar di sekolah terutama bagi remaja putri, secara otomatis hal itu berpengaruh pada usia melangsungkan perkawinan. Berdasarkan data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) antara 1997 dan 2002-2003 dapat diketahui bahwa, medium umur perkawinan pertama wanita umur 25-29 tahun meningkat dari 18,6 tahun menjadi 19,2 tahun. Selanjutnya, pada 2007 meningkat lagi pada usia 19,8 tahun. Yang lumayan menggembirakan adalah meningkatnya median usia kawin pertama wanita dari 19,8 tahun (SDKI 2007) menjadi 20,1 tahun (SDKI 2012), meskipun masih belum sesuai dengan angka yang diharapkan, yaitu 21 tahun. Wanita perkotaan menikah dua tahun lebih lambat dari pada wanita pedesaan; medium umur perkawinan pertama untuk wanita perkotaan adalah 20,3 tahun, dibandingkan dengan 18,3 tahun untuk wanita pedesaan.²⁷ Matangnya usia menikah pada pasangan kawin tersebut akan berimplikasi pada hubungan keluarga batih, pun demikian karena ditunjang oleh pendidikan yang memadai serta kesempatan kerja membuat kondisi keluarga akan cenderung lebih stabil.²⁸

Kemandirian Perempuan

Pada umumnya perempuan yang berpendidikan akan memilih pasangan hidup yang berpendidikan. Pendidikan dapat menyebabkan perempuan tambah kritis dalam menyikapi permasalahan yang dihadapi dan cenderung bersikap mandiri. Dengan daya kritis dan pendidikan yang mumpuni menyebabkan ia tidak mau tunduk terhadap budaya

²⁷ Berdasarkan data Riskesdas 2010 menunjukkan bahwa prevalensi umur perkawinan pertama antara 15-19 tahun sebanyak 41,9 persen. Dan menurut data Susenas tahun 2010, secara nasional rata-rata usia kawin pertama di Indonesia 19,70 tahun, rata-rata usia kawin di daerah perkotaan 20,53 tahun dan di daerah pedesaan 18,94 tahun, masih terdapat di beberapa propinsi rata-rata umur kawin pertama perempuan dibawah angka nasional, lihat *selengkapnya*, (Seri I No.6/Pusdu-BKKBN/Desember 2011).

²⁸ T.O. Ihromi, "*Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*", (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).

patriarki yang cenderung mengukungnya dalam ruang domestik.²⁹ Berbekal pengalaman dan pendidikan yang baik membuat kaum perempuan dapat beraktualisasi di ranah publik. Mereka mampu berkompetisi dalam memperebutkan jabatan politik atau jenjang karier akademik dan profesional.

Keterlibatan perempuan dalam parlemen misalnya adalah salah satu bukti nyata bahwa emansipasi perempuan memiliki korelasi yang signifikan dengan pencapaian tingkat pendidikan. Sebab, tanpa pendidikan yang cukup sangat susah bagi seseorang untuk bisa duduk di jajaran kursi parlemen. Suatu jabatan politik yang harus diraih dengan kompetensi yang sangat ketat bahkan kadang melalui intrik-intrik yang kotor dan jauh dari etika politik itu sendiri.

Data terkait jumlah perempuan parlemen di era reformasi menunjukkan angka yang terus meningkat. Pada periode 1999-2004, jumlah keterwakilan perempuan sebanyak 57 orang atau 11,40 % dari total anggota DPR RI sebanyak 500 orang. Periode tahun 2004-2009, jumlah keterwakilan perempuan sebanyak 56 orang atau 10,18 % dari jumlah anggota DPR RI sebanyak 550 orang. Sedangkan pada periode 2009-2014 atau periode yang sedang berlangsung sekarang, jumlah keterwakilan perempuan di DPR RI berjumlah 101 orang atau 18 % dari total anggota DPR RI sebanyak 560 orang, naik menjadi 8 % dari periode sebelumnya.³⁰

Sementara untuk jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) perempuan hasil pemilu 2004 berjumlah 26 orang (18,8%) dan laki-laki 106 orang (80,2 %). Pada pemilu 2009 mengalami peningkatan jumlah anggota DPD perempuan menjadi 34 orang (27,27 %) dan laki-laki 98 orang atau (72,73 %). Meski demikian, harus diakui bahwa di bidang eksekutif dan yudikatif secara kuantitatif perbandingan dan kemajuan kepemimpinan perempuan belum begitu nampak menggembirakan.³¹

29 Robert O. Blood, *"The Family"*, (New York: The Free Press, 1971).

30 <http://www.jabarprov.go.id/index.php/subMenu/informasi/artikel/detailartikel/67>, diunduh pada Selasa, tanggal 10 Desember 2013, pukul: 09.20 wib.

31 Perlu diketahui politisi perempuan yang duduk di kursi DPRD I di 33 provinsi totalnya hanya mencapai 16 %, sedangkan DPRD Kabupaten/Kota hanya mencapai 12 %, bahkan masih terdapat 10 % dari 497 Kabupaten/Kota tidak terdapat keterwakilan perempuan di legislatif. Pada posisi eksekutif dapat dilihat dari keterwakilan perempuan yang sangat minim. Tercatat hanya terdapat 1 orang Gubernur dan 1 Wagub dari 33 Gubernur/Kada, serta 38 Bupati/Walikota (7,6%) dari 497 Kabupaten/Kota. Keterwakilan perempuan pada posisi Menteri/Wakil Menteri pun baru mencapai 11% dari 56 Menteri/Wakil Menteri atau setingkat Menteri. Adapun berdasarkan data tahun 2010 dari Kementerian PAN & RB menyatakan bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 4.598.100 orang, yang terdiri dari perempuan 46,48% dan Laki-laki 53,52% dengan komposisi keterwakilan perempuan: Eselon I sebanyak 9 %, Eselon II sebanyak 7 %, Eselon III sebanyak 16 % dan Eselon IV sebanyak 25 %. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi jabatan tersebut semakin rendah posisi

Di beberapa daerah representasi perempuan yang duduk sebagai wakil rakyat juga patut mendapatkan apresiasi meskipun belum menunjukkan sebaran angka yang signifikan. Bertolak dari hasil pemantauan JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat) di lima daerah penulis dapat memahami bahwa tiket kursi parlemen di daerah ternyata masih kurang berpihak kepada kaum perempuan. Padahal, tidak bisa dipungkiri kualitas individu politisi perempuan belum tentu kalah hebat dengan politisi laki-laki. Banyak politisi perempuan yang menjadi srikandi parlemen, kritis dan vokal, berani menyuarakan pendapatnya terutama yang menyangkut hak kaum perempuan.

Meskipun jumlah pemilih perempuan lebih banyak dari pemilih laki-laki, tapi anehnya perwakilan perempuan di berbagai daerah jumlahnya justru malah sedikit. Begitu pun di tingkat politik nasional jelas tidak ada korelasi yang signifikan antara suara pemilih kaum perempuan dengan jatah kursi di parlemen yang diperoleh politisi perempuan.³² Pada Pemilu tahun 2009 jumlah pemilih perempuan ada 87.854.388 jiwa atau 49,8 persen dari total pemilih secara nasional, akan tetapi representasi politik perempuan di DPR hanya sebesar 101 orang (sekitar 18 persen). Sedangkan pemilih laki-laki berjumlah 88.560.046 orang atau 50,2 persen, tetapi jumlah representasi politik di parlemen 82 persen, yang setara dengan 459 kursi.

Realitas yang sama terkait representasi politik perempuan juga ada kesamaannya di kancah politik lokal seperti kondisi di lima daerah sebagaimana ditunjukkan pada tampilan data di bawah ini:

Tabel. 3. Representasi Perempuan dalam Politik Lokal

Nama Daerah	Jumlah Kursi DPRD II	Komposisi Legislator			
		Laki-laki	%	Perempuan	%
Kab. Lamongan	50	46 orang	92	4 orang	8
Kab. Pinrang	35	31 orang	88,5	4 orang	11,5
Kota Bekasi	50	43 orang	86	7 orang	14
Kota Banjarmasin	45	33 orang	73,3	12 orang	26,7
Kota Padang	45	41 orang	91	4 orang	9

Sumber: Diolah dari laporan tahunan JPPR tahun 2009.

perempuan. Lihat, <http://www.indonesiamedia.com/2013/04/05/aspirasi-perempuan-indonesia/>, diunduh pada Selasa, 10 Desember 2013, pukul: 09.35 wib.

³² Ani Soetjipto, *at.al.*, "Kerja Untuk Rakyat: Buku Panduan Anggota Legislatif," (Jakarta: Puskapol, The Asia Foundation dan Norwegian Embassy, 2009), hlm. 29.

Dari aspek keluarga berencana sebagaimana yang dikatakan Blood,³³ dengan bekal pendidikan yang baik pasangan kawin akan memiliki ketrampilan teknis yang baik dalam memilih dan menggunakan alat kontrasepsi. Selain itu, terutama bagi pihak perempuan akan semakin besar kemungkinannya berhasil dalam merencanakan baik dalam jumlah anak yang dilahirkan ataupun pengaturan waktu kelahiran.

Masih terkait dari segi keistimewaan perempuan yang berpendidikan tadi. Berdasarkan data SDKI tahun 2012 dinyatakan, bahwa perempuan yang berpendidikan menengah atas memiliki keinginan yang tinggi dalam hal memperoleh pelayanan di bidang Keluarga Berencana (KB). Barangkali kesadaran ber-KB ini muncul karena adanya pertimbangan, bahwa kualitas anak jauh lebih baik daripada kuantitas anak, yaitu dengan mengatur jarak kelahiran (penjarangan anak). Hal ini sebagaimana ditunjukkan data tabel di bawah:

Tabel. 4. Kebutuhan Untuk Memperoleh Pelayanan KB

Latar Belakang Pendidikan Ibu	Persentase Kebutuhan Pelayanan KB Yang Terpenuhi	Jumlah Wanita
Tidak Sekolah	76,4	1.209
Tidak Tamat SD	78,7	4.185
Tamat SD	85,2	9.045
Tidak Tamat SMTA	87,5	7.912
Tamat SMTA +	84,2	11.113
Jumlah	84,5	33.465

Sumber: Survei Demografi Dan Kesehatan Indonesia (SDKI), Tahun 2012.

Berdasarkan keterangan tabel di atas, dapat diketahui, jumlah kebutuhan KB yang terpenuhi meningkat sejalan dengan naiknya tingkat pendidikan perempuan, mulai 76,4 persen untuk perempuan yang tidak mengenyam pendidikan sekolah sampai dengan angka 87,5 persen untuk perempuan yang tidak tamat SMTA.

Berdasarkan survei SDKI pada tahun yang sama, perempuan yang berpendidikan juga sangat sadar akan pentingnya kesehatan bayi, karena anak adalah investasi masa depan yang sangat bernilai. Oleh karena itu, demi mempertimbangkan kualitas anak maka sejak mengandung perempuan yang berpendidikan SMA atau yang

33 Robert O. Blood, *"The Family"*, (New York: The Free Press, 1971).

lebih tinggi lebih menunjukkan perhatian yang begitu besar dalam hal pemeriksaan kandungannya dengan angka 97,4 persen, begitu sebaliknya perempuan yang tidak berpendidikan juga menunjukkan angka yang rendah, yaitu hanya 64 persen.

Tabel. 5. Pemeriksaan Kehamilan

Latar Belakang Pendidikan Ibu	Persentase yang kehamilannya diperiksa oleh tenaga kesehatan	Jumlah Wanita
Tidak Sekolah	64,0	274
Tidak Tamat SD	88,5	1.242
Tamat SD	94,0	3.516
Tidak Tamat SMTA	97,4	3.965
Tamat SMTA +	98,6	5.786
Jumlah	95,7	14.782

Sumber: Survei Demografi Dan Kesehatan Indonesia (SDKI), Tahun 2012.

Pemeriksaan rutin kandungan tidak hanya bermanfaat bagi sang ibu, tetapi lebih dari itu mengetahui kondisi anak yang masih dalam kandungan juga sangat perlu. Butuh terus dipantau supaya segala kemungkinan yang bakal terjadi dapat segera diatasi dengan baik. Berjaga-jaga jauh lebih baik daripada sibuk mencari jalan keluarnya apabila sudah tertimpa masalah.

Selanjutnya, survei juga menunjukkan bahwa ada korelasi antara tingkat pendidikan dengan kesadaran perempuan terhadap keselamatan diri dan bayinya sewaktu proses melahirkan yaitu 95,1 dan 81,9 persen bagi perempuan yang berpendidikan SMA + yang memilih proses kelahirannya minta dibantu oleh tenaga medis atau kesehatan.

Tabel. 6. Proses Persalinan Anak

Latar Belakang Pendidikan Ibu	Persentase Yang Kelahirannya Ditolong Oleh Tenaga Medis	Presentase Yang Kelahirannya Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan	Jumlah Wanita
Tidak Sekolah	31,8	21,1	365
Tidak Tamat SD	61,1	38,0	1.457
Tamat SD	72,8	47,1	3.976
Tidak Tamat SMTA	85,7	61,0	4.438
Tamat SMTA +	95,1	81,9	6.712
Jumlah	83,1	63,2	16.948

Sumber: Survei Demografi Dan Kesehatan Indonesia (SDKI), Tahun 2012.

Selain itu perempuan yang berpendidikan tinggi pada umumnya akan menunjukkan kesadaran yang lebih tinggi dalam hal menjaga kesehatan balita, yaitu sebanyak 70,3 persen untuk imunisasi polio dan 85,6 persen untuk imunisasi campak.

Tabel. 7. Imunisasi Yang Dilakukan Kepada Anak

Latar Belakang Pendidikan Ibu	Pernah Imunisasi		Tidak Pernah	Jumlah Anak
	Polio	Campak		
Tidak Sekolah	20,6	33,4	39,3	53
Tidak Tamat SD	46,9	59,4	19,1	219
Tamat SD	56,0	78,1	8,6	770
Tidak Tamat SMTA	64,4	81,5	7,1	939
Tamat SMTA +	70,3	85,6	3,8	1.352
Jumlah	63,0	80,1	7,4	3.333

Sumber: Survei Demografi Dan Kesehatan Indonesia (SDKI), Tahun 2012.

Terkait dengan kesadaran reproduksi, bahwa pengetahuan pasangan suami istri yang berpendidikan tinggi tentang penyakit yang berbahaya HIV-AIDS menunjukkan angka yang tinggi pula, yaitu 96,9 persen pasangan wanita yang pernah mendengar dan 98,4 pasangan laki-laki yang pernah mendengar penyakit HIV-AIDS.

Tabel. 8. Pengetahuan Pasangan Suami-Istri Tentang HIV-AIDS

Latar Belakang Pendidikan Pasangan	WANITA		PRIA	
	Pernah Dengar HIV-AIDS	Jumlah	Pernah Dengar HIV-AIDS	Jumlah
Tidak Sekolah	15,7	1.500	28,9	265
Tidak Tamat SD	38,0	4.870	51,7	1.371
Tamat SD	62,3	10.254	74,9	2.118
Tidak Tamat SMTA	84,6	12.753	89,5	1.979
Tamat SMTA +	96,9	16.229	98,4	3.572
Jumlah	76,7	54.607	82,3	9.306

Sumber: Survei Demografi Dan Kesehatan Indonesia (SDKI), Tahun 2012.

Dan kesadaran terhadap hak-hak perempuan yang tinggi akan muncul seiring meningkatnya pendidikan. Sehingga ia tidak akan tinggal diam manakala diperlakukan tidak adil. Dengan berbekal

pendidikan yang cukup perempuan dapat menempuh karier profesional atau memperoleh pekerjaan dengan gaji yang tinggi di sebuah instansi pemerintahan atau di perusahaan swasta. Berbekal pendidikan yang mumpuni di tambah pula penghasilan yang lebih dari cukup semakin membuat ia semakin mandiri dan tentu saja makin setara dengan laki-laki yang menjadi pasangannya. Walhasil, ia semakin berani membuat keputusan dan sadar akan haknya. Ketika ia mendapatkan perlakuan kasar dari pasangannya, ia tahu bahwa hal itu adalah termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang sepatutnya tidak perlu terjadi. Atau munculnya persoalan-persoalan lain di seputar rumah tangga yang sekiranya dianggap menyakiti hati perempuan dan tidak segera bisa diselesaikan di antara mereka maka ia tidak segan akan menentanginya bahkan meminta gugat cerai kepada suaminya.

Tabel. 9. Fenomena Perceraian di Kalangan Kelas Menengah-Atas di Jakarta

Faktor permasalahan	Persentase	Keterangan
Karena alasan ekonomi	55 %	Umumnya istri bekerja sementara suami tidak bekerja atau suami berpenghasilan lebih rendah
Karena alasan perselingkuhan (seks)	35 %	Suami merasa banyak duit kemudian tidak puas dengan istrinya lalu mencoba-coba "jajan" di luar, atau punya wanita simpanan
Karena alasan kepribadian	10 %	Karena suami sakit, istri mandul dan masalah kepribadian

Sumber: Majalah Intisari (November, 2011). Berdasarkan wawancara konsultan hukum keluarga, Latief Nasution: bahwa 99 persen klien adalah perempuan pekerja dan mandiri pada usia sekitar 23-35 tahun.

Meskipun belum saya temukan data yang menjelaskan korelasi antara kasus perceraian dengan meningkatnya partisipasi pendidikan di antara pasangan kawin (suami-istri), namun fenomena perceraian di Indonesia berdasarkan data Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama Republik Indonesia menyatakan bahwa tingkat perceraian di Indonesia tiap tahun selalu meningkat. Menurut data terakhir angkanya mencapai 10 persen. Jika diuraikan lebih rinci,

penyebab utama perceraian (51 %) adalah masalah ekonomi, seperti suami lari dari tanggung jawab nafkah keluarga, penyebab kedua (32 %) adalah karena adanya faktor ketidakharmonisan dalam keluarga –perselisihan terus-menerus dan tidak bisa didamaikan lagi meskipun sudah melalui saran-saran dan mediasi dari pengadilan. Penyebab yang ketiga adalah masalah hadirnya orang ketiga yaitu 11 persen, misalnya karena perselingkuhan, cemburu buta dan poligami. Dan yang selebihnya adalah karena disebabkan letupan-letupan masalah kecil seperti soal menyikapi kepribadian pasangan, yang prosentasenya memang sedikit.³⁴

Dinamika Keluarga Inti

Dalam anggitan modernisasi, tujuan pengembangan masyarakat adalah transformasi struktur sosial melalui sistem pendidikan serta penggunaan norma-norma dan nilai-nilai baru. Menurut Szymon Chodak,³⁵ dalam modernisasi yang terinduksi sebagaimana jalannya pembangunan yang diintroduksi dari negara memiliki tujuan utama yaitu mengubah populasi masyarakat menjadi “bentuk” yang baru, memperkuat kesatuan bangsa dengan tetap mempertahankan bagian-bagian dari tradisi kebudayaannya (norma, simbol, adat-istiadat, pola tingkah laku dan aspek-aspek struktur sosial), serta mencoba menyatukan bagian-bagian tersebut ke dalam tatanan baru yang ada di dalam masyarakat.

Dalam konteks pembangunan keluarga di Indonesia, bagian-bagian dari kebudayaan bangsa masih tetap dipertahankan, meskipun kita tidak bisa memungkiri dalam banyak hal beberapa unsur-unsur dari kebudayaan daerah yang menjadi *soko guru* dari puncak kebudayaan nasional telah banyak yang berubah selaras dengan perubahan pola pikir dan sistem pengetahuan yang ada pada generasi muda di zamannya. Salah satu contoh, pasangan kawin muda yang dalam adat lokal mengikuti sistem matrilokal ternyata mereka telah banyak yang enggan tinggal bersama keluarga besar dari pihak perempuan dengan alasan misalnya, tempat kerja yang jauh atau karena tidak ingin selalu tergantung pada keluarga besarnya, takut urusan privasinya terganggu, dll. Jadi, mereka lebih memilih untuk tinggal di tempat yang baru (di kontrakan, apartemen atau lokasi perumahan) dengan mempertahankan struktur keluarga inti yang

34 Ditulis berdasarkan laporan majalah Intisari, edisi: November 2011.

35 Seperti dikutip dalam Marx Hutter, “*The Changing Family: Comparative Perspectives*”, (Macmillan Pub Co; 2nd edition, 1988).

mandiri. Dengan demikian akan lebih mudah menghindar dari “intervensi” keluarga besar (terutama pihak orang tua) yang biasanya ingin ikut campur dalam mengatur urusan anak-anak mereka yang sudah hidup berkeluarga, lebih-lebih pada pasangan kawin muda yang baru membina keluarganya.

Paparan contoh kasus di atas, bahwa keluarga inti yang cenderung ingin memisahkan diri dari kukungan keluarga besarnya menurut Goode,³⁶ merupakan fenomena perubahan keluarga yang terjadi sebagai dampak dari proses industrialisasi secara global di dunia ini, yaitu keluarga di mana-mana cenderung mengalami perubahan ke arah bentuk yang dia sebut keluarga konjugal. Gambaran keluarga konjugal menurut Goode adalah keluarga di mana keluarga batih menjadi semakin mandiri dalam melakukan peran-perannya, lebih bisa melepaskan dari pengaruh atau campur tangan kerabat luas dari pihak suami atau istri. Secara ekonomi, keluarga konjugal lebih bisa mandiri, tempat tinggal juga sendiri, tidak kumpul dalam satu lokasi dengan tempat tinggal dengan keluarga besarnya. Dan secara psikologis, unit keluarga kecil ini menjadi semakin berdikari. Hal ini berarti secara emosional hubungan suami-istri menjadi lebih terpusat dalam kehidupan keluarga yang pada gilirannya hubungan di antara mereka kian bertambah akrab.³⁷ Di dalam sistem kekerabatan keluarga konjugal, di mana individu menjadi sangat sentral menentukan peranannya. Oleh karena sistem kekerabatan semacam ini bisa eksis dalam lingkungan industrial atau pada komunitas urban yang cenderung berpandangan “individualis”. Dalam sistem industri misalnya, seseorang mendapatkan pekerjaan atau posisi jabatan tertentu bukan berdasarkan pada hubungan-hubungan keluarga, tapi lebih didasarkan karena prestasi individu yang bersangkutan. Dunia kerja di sektor industri sangat menuntut hardinya individu yang bisa bekerja secara profesional dan memiliki komitmen dengan bidang pekerjaan yang dijalani, kalau individu tidak memiliki prestasi demikian maka dengan sendirinya ia akan tersingkir dan diganti oleh orang lain yang lebih mampu.

Pola hubungan keluarga dalam ciri konjugal pada tahap perkembangan lebih lanjut mengarah pada tipe keluarga simetris atau *symmetrical family*.³⁸ Menurut mereka, karakteristik keluarga yang

36 T.O. Ihromi, “*Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*”, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), 2004.

37 Ihromi, op.cit., hlm.56.

38 Konsep tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Young dan Willmott (1973), dalam Abercrombie, *at.al.*, “*Kamus Sosiologi*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 568.

muncul di era modern ini ditandai tiga hal; (1) Suami dan istri berpusat pada rumah, terutama ketika anak-anak mereka masih kecil; (2) Kurang bisa dimasukkan sebagai keluarga luas (*extended family*), tetapi lebih dari keluarga inti (*nuclear family*); (3) Kurang ada pembagian kerja antara suami dan istri dalam pelaksanaan tugas-tugas rumah tangga. Pihak laki-laki mengambil tanggung jawab lebih dalam pemeliharaan rumah dan perawatan anak dan perempuan yang sudah menikah umumnya bekerja di luar rumah lebih banyak. Fenomena keluarga simetris mempresentasikan adanya penyatuan dan kembalinya “keutuhan” keluarga, tetapi berkisar dalam hal konsumsi, bukan produksi. Di sini sungguh-sungguh terlihat nyata keterputusan, setidaknya di antara rumah tangga keluarga inti dan keluarga besarnya (*extended family*).³⁹

Kembali mendiskusikan tipe keluarga simetris tadi, dalam kenyataannya, dewasa ini dengan capaian pendidikan dan karir pekerjaan (suami-istri) pengaruh struktur purposif di luar keluarga kian mengambil alih peranan yang selama ini dilakukan di lingkungan struktur primordial.⁴⁰ Sebagai contoh, seiring bertambahnya aktivitas laki-laki (suami) maupun perempuan (istri) di luar rumah dalam banyak kasus peran produksi dan ekonomi yang dilakukan di lingkungan struktur primordial menjadi beralih pada lingkup struktur purposif. Misalnya, karena di lingkungan keluarga jarang terjadi makan bersama maka anak-anak lebih suka mengkonsumsi makanan cepat saji yang disediakan oleh korporasi atau pabrik. Oleh karena orang tua tidak ada waktu luang menemani anak-anaknya belajar di rumah maka secara otomatis mereka akan beralih mencari tempat bimbingan belajar yang banyak disediakan oleh para penyedia jasa pendidikan (bimbingan belajar). Inilah fenomena yang tidak hanya terjadi di kota-kota besar seperti di Jakarta, Surabaya, Medan dan lain-lain, tetapi juga merambah di daerah-daerah suburban bahkan di desa-desa pinggiran.

39 *Ibid*, Abercrombie, *at.al*. Hal yang sama dikemukakan oleh Miriam E. David, “*Social inequalities, gender and lifelong learning: a feminist, sociological review of work, family and education*,” *International Journal of Sociology and Social Policy*, 2008. Vol. 28 No. 7/8: pp. 260-272.

40 Coleman (2010; 796) mengandaikan di masyarakat yang sudah tergolong maju muncul dua struktur organisasional yang sejajar: (i) struktur primordial yang berbasiskan dan berasal dari keluarga, dan (ii) struktur baru dari pelaku-kelompok purposif yang sepenuhnya lepas dari keluarga. Struktur yang pertama terdiri dari keluarga, kerabat (*kinship*), lingkungan dan kelompok-kelompok agama. Sedangkan struktur yang kedua terdiri dari organisasi-organisasi ekonomi (firma, serikat dagang dan asosiasi profesi), asosiasi relawan yang satu tujuan dan pemerintah.

Inovasi dan Pola Kehidupan Keluarga

Dampak kemajuan dunia pendidikan telah membawa perubahan yang mendasar bagi kehidupan umat manusia, termasuk yang terjadi di Tanah Air. Terutama dengan penemuan-penemuan baru serta karya inovasi di bidang teknologi melalui penelitian di perguruan tinggi (PT). Temuan-temuan baru dari hasil pengembangan riset dan inovasi teknologi tersebut tidak hanya semakin memudahkan kegiatan manusia di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tetapi juga sangat mempengaruhi cara pandang, gaya hidup, peranan dan fungsi keluarga. Misalnya, untuk memasak nasi tidak perlu lagi susah-susah mencari kayu bakar. Sekarang mau mencuci pakaian tidak harus menimba air sumur atau pergi ke sungai, yaitu cukup menyalakan mesin pompa air dan menaruh pakaian di mesin cuci. Bahkan tidak perlu lagi menjemur pakaian di bawah sinar matahari. Kita tinggal menekan tombol otomatis, semua akan berjalan sesuai prosedur kerja elektronik dan, selesai.

Dewasa ini hampir semua kebutuhan rumah tangga bisa dilayani dengan mesin lewat aplikasi teknologi yang semakin hari semakin canggih. Berkat hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh PT atau lembaga riset sejenis telah mendorong prakarsa industri untuk mengembangkan produk komoditi dalam skala masal dan dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Tak terkecuali produk-produk pabrikan yang sebagai besar menyasar ke konsumen keluarga mulai dari industri di bidang farmasi, pangan, kesehatan, perumahan dan lain-lain.

Dengan dipasarkannya makanan khusus bayi yang berupa bubur dan biskuit buatan pabrik maka saat ini kita akan susah menemukan anak balita yang disuapi (Jawa: *dilotek*) oleh ibunya dengan buah pisang dicampur nasi. Tak hanya di situ, peralatan untuk merawat bayi juga semakin canggih. Kini para bidan desa pun telah menggunakan peralatan medis untuk pemeriksaan ibu hamil yang telah memenuhi standar nasional. Sekelumit cerita ini tentu telah mengisaratkan adanya perubahan cara pandang atau persepsi orang dalam penanganan ibu dan balita yang kini telah banyak berubah. Sebelum program Keluarga Berencana (KB) mulai digalakkan, hingga tahun 1980-an perempuan yang lagi hamil dan mau melahirkan ditolong oleh dukun bayi, tapi setelah banyak dokter spesialis kandungan dan bidan membuka praktek mereka telah banyak yang meninggalkan tradisi lama kemudian beralih untuk proses persalinannya minta ditolong kepada tenaga kesehatan.

Pada aspek pelayanan publik di bidang kesehatan Indonesia telah banyak mengalami perkembangan berarti meskipun hasilnya belum bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Layanan kesehatan yang tersedia berupa 2.083 rumah sakit (per Januari 2013) dan 9.599 puskesmas (per Maret 2013) yang tersebar di Indonesia.⁴¹ Peralatan medis yang tersedia juga sudah semakin modern, serta didukung sejumlah tenaga medis dan para medis yang cukup memadai.

Tabel. 10. Jumlah dokter dan tenaga medis di Indonesia tahun 2013.

Bidang Profesi	Jumlah	Keterangan
Dokter Umum	88.309 orang	Idealnya dibutuhkan sekitar 101.040 dokter umum sebab angka ideal perbandingannya adalah 1:2.500 (penduduk)
Dokter Spesialis	41.691 orang	Belum semua puskesmas terdapat dokter spesialis
Dokter Gigi	21.900 orang	Idealnya dibutuhkan 23.700 tenaga dokter gigi sebab angka ideal perbandingannya adalah 1:10.000 (penduduk) 40 persen membuka praktik pribadi dan dari seluruh jumlah puskesmas yang ada hanya 60 % yang dapat dilayani dokter gigi.
Bidan	200.000 orang	Yang sudah tersertifikasi sebagai Bidan Delima hanya 11.000 orang
Perawat	220.575 orang	80 persen perawat yang bekerja di rumah sakit vertikal dengan berpendidikan Diploma III, Diploma IV 0,5 persen, Sarjana Strata Satu Keperawatan 1 persen, Ners 11 persen, dan Sarjana Strata Dua 0,4 persen. Sedangkan perawat yang berpendidikan Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) sebanyak 7 persen.

Sumber: Diolah berdasarkan Laman Kemenkes RI. (<http://www.depkes.go.id>.)

Para profesional di bidang kesehatan ini jumlahnya akan terus meningkat karena jumlah penduduk sebagai konsumen kesehatan juga meningkat. Apalagi sekarang ini di Indonesia telah ada 72 fakultas

⁴¹ <http://komisiixnews.com/2013/03/sampai-maret-2013-jumlah-rumah-sakit-mencapai-2-083-buah/> diunduh pada Minggu, 12 Januari 2014, pukul: 80.30 wib.

kedokteran yang kira-kira mampu menghasilkan 5.000 hingga 6.000 dokter per tahun.⁴² Belum lagi sekolah-sekolah yang secara khusus mencetak profesi bidan dan perawat serta para medis lainnya.

Dengan adanya peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, ditambah pula semakin meningkatnya kesadaran masyarakat khususnya kaum perempuan yang telah mengenyam pendidikan sekolah, maka kian berdampak pada peningkatan kualitas keluarga di Indonesia. Setidaknya dapat disebutkan dua indikator penting yang menjadi alasan pernyataan ini: *Pertama*, adalah tren penolong persalinan yang dilakukan oleh dokter atau tenaga medis di Indonesia selama dua dekade terakhir (SDKI 1991 – 2012) yang fenomenanya cenderung naik (lihat tabel: 11 di bawah). *Kedua*, adanya kecenderungan CPR (*Contraceptive Prevalence Rate*) pada kaum perempuan menikah umur 15 – 49 tahun selama dua puluh tahun terakhir (SDKI 1991-2012) juga meningkat meskipun tidak terlalu tinggi (lihat tabel: 12).

Tabel. 11

Tren penolong persalinan oleh dokter atau tenaga medis di Indonesia tahun 1991 – 2012

No.	Tahun	Persentase
1.	1991	32
2.	1994	37
3.	1997	43
4.	2002-2003	66
5.	2007	73
6.	2012	83

Sumber: SDKI 1991, 1994, 1997, 2002-2003, 2007, 2012

Berdasarkan data tabel 10, di mana semenjak akhir tahun 90-an terlihat ada tren atau perubahan yang signifikan pada kaum perempuan yang dalam proses persalinan lebih memilih ditolong oleh dokter atau tenaga medis lainnya daripada ke tempat dukun bayi. Hal ini bisa dimaknai bahwa telah terjadi peningkatan kesadaran pada perempuan terhadap kesehatan reproduksi karena mereka telah banyak mendapatkan informasi tentang hal tersebut (bandingkan dengan keterangan pada table: 6 di atas). Di samping itu, juga adanya kemudahan akses terhadap pelayanan kesehatan karena secara ekonomi cukup terjangkau. Ini berarti bahwa faktor keterjangkauan

⁴² <http://www.investor.co.id/home/wamenkes-indonesia-kekurangan-12371-dokter/57605>, diunduh pada Minggu, **12 Januari 2014**, pukul: 09.40 wib.

sangat penting baik yang menyangkut jarak tempuh atau segi biaya perawatan medis yang pada umumnya dirasa masih mahal bagi kalangan *wong cilik* (masyarakat miskin).

Tabel. 12.
Kecenderungan CPR pada perempuan menikah 15 - 49 tahun, tahun 1991-2012

No.	Tahun	Persentase CPR		
		Semua Cara	Cara Modern	Cara Tradisional
1.	1991	49,7	47,1	2,6
2.	1994	54,7	52,1	2,6
3.	1997	57,4	54,7	2,7
4.	2002-2003	60,3	56,7	3,6
5.	2007	61,4	57,4	4
6.	2012	61,9	57,5	4

Sumber: SDKI 1991, 1994, 1997, 2002-2003, 2007, 2012

Meningkatnya capaian CPR dapat berarti semakin tingginya pasangan kawin yang berkeinginan tidak punya anak banyak tapi lebih berkualitas. Pandangan ini tentu saja telah merubah anggapan lama, yaitu *banyak anak, banyak rezeki*. Pikiran orang sekarang tidak seperti orang dulu, anak dinilai sebagai “aset ekonomi” yang dapat membantu mendatangkan sumber-sumber ekonomi untuk menopang keluarga. Maka, dengan semakin banyak anak secara otomatis banyak pendapatan keluarga yang terkumpul. Tapi seiring berubahnya pengetahuan dan nilai-nilai baru, ternyata mempunyai anak banyak kalau tidak berkualitas justru akan menambah beban orang tua, apalagi biaya perawatan untuk mengurus anak juga semakin mahal.

Alasan yang lain, kenapa orang tua dulu cenderung punya anak banyak? Karena zaman dulu resiko kematian pada bayi masih sangat tinggi, oleh karena itu orang berkeinginan punya anak banyak sehingga kalau ada yang meninggal masih ada keturunan lain yang bisa menemani mereka hingga di usia senja. Karya inovasi lain yang menjadi salah satu tipe keluarga masa kini adalah kecenderungan untuk bertempat tinggal terpisah dengan keluarga besar, yaitu lebih memilih tinggal di kawasan perumahan (*residency*) atau di apartemen (bagi kaum profesional atau kelas menengah-atas). Oleh karena itu, penemuan-penemuan baru di bidang perumahan --dengan produk-produk rumah gaya minimalis yang ditawarkan pengembang-- ternyata banyak menarik minat pasangan suami-istri dari kalangan

kelas menengah ekonomi, tak terkecuali bagi pasangan baru menikah untuk segera mengambil kredit. Pembukaan *cluster-cluster* baru dalam area pemukiman baru di wilayah pemukiman kota dan daerah pinggiran (suburban) tersebut akan berkontribusi terhadap perubahan pola hubungan keluarga inti dengan keluarga besarnya. Untuk urusan selera dalam memilih rumah tinggal misalnya, sekarang pihak keluarga besar (orang tua, mertua) tidak banyak ikut campur dengan pilihan anak-anak mereka yang sudah berkeluarga.

Walhasil, pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai baru yang berhasil ditransmisikan baik melalui pendidikan (sekolah) atau lembaga pelatihan sangat mempengaruhi cara pandang, gaya hidup maupun selera seseorang sehingga akan tercermin juga di dalam membangun biduk rumah tangganya.

Penutup

Ada tanggung jawab pendidikan bagi orang tua terhadap anak-anak mereka. Di zaman pra industri anak-anak mendapatkan pendidikan tentang nilai-nilai dan keadaban serta ketrampilan dari orang tua. Pengetahuan orang tua ditransmisikan langsung kepada anak-anak lewat sosialisasi kehidupan dalam keluarga dan komunitas. Namun, setiap saat zaman terus berubah dengan segala perkembangannya. Ketika perkembangan memasuki masa modern, di mana proses industrialisasi kian berkembang dahsyat, yang ditandai keterbukaan teknologi, keterbukaan cara berpikir, keterbukaan cara berperilaku serta ketersediaan sarana pendidikan yang jauh lebih baik dari generasi sebelumnya. Kedaan itu mau-tidak-mau mengharuskan kepada para orang tua untuk mengikuti perkembangan dan tuntutan modernisasi tersebut yang jelas mempengaruhi sendi-sendi kehidupan keluarga. Memang, secara struktur keluarga masih bisa dipertahankan, tapi peran dan fungsi keluarga barangkali telah banyak yang mengalami degradasi. Misalnya, fungsi keluarga sebagai tempat mendidik anak telah berkurang seiring munculnya lembaga pendidikan formal (sekolah), yang kemudian mengambil alih fungsi itu dalam upaya membekali anak tentang ilmu pengetahuan, nilai-nilai baru dan ketrampilan. Kini, sekolah telah menjadi tumpuhan keluarga untuk menyiapkan anak-anak mereka ke arah kedewasaan, menjadi pribadi yang berkarakter dan mandiri.

Dalam masyarakat modern yang cirinya antara lain adalah sistem ekonomi yang bertopang pada aktivitas industrial, sistem keluarga juga telah mengalami transformasi sosial dari yang

tradisional ke modern. Keluarga modern diasumsikan memiliki ciri-ciri tipe keluarga konjugal di mana para anggota keluarga batih (*nuclear family*) agak sama kedudukannya. Suami istri terlibat dalam hubungan yang setara, mempunyai hubungan personal yang akrab, antara orang tua dan anak terjalin hubungan yang tidak otoriter, pola relasi antarpersonal yang setara, dialogis atau berciri demokratis.

Dengan meningkatnya partisipasi pendidikan anak yakni lamanya masa studi anak mengenyam pendidikan formal (sekolah), maka para remaja melangsungkan perkawinan pada usia yang tidak terlalu muda. Pada keluarga yang bercirikan konjugal itu jumlah keluarga cenderung sedikit, di Indonesia keluarga konjugal kebanyakan adalah memiliki dua orang anak, meski demikian angka perceraian cenderung meningkat.

Daftar Bacaan

- Ahmadi, Abu. (2007). *"Sosiologi Pendidikan"*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Al-Abrasy, M. Athiyah. (1987). *"Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam"*. (Terj. Bustami Abdul Ghani dan Djohar Bahry). Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Al-Samarrai, Samer. (2013). "Sebuah Janji untuk "Generasi Emas" (Opini). Jakarta: Kompas. 10 September 2013.
- Ambercrombie, Nicholas, *at.al.*, (2010). *Kamus Sosiologi*. diterjemahkan dari aslinya. "The Penguin Dictionary of Sociology". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Blood, Robert O. jr. . (1972). *"The Family"*. New York: The Free Press.
- Coleman, James S.. (2010). *Dasar-Dasar Teori Sosial*. diterjemahkan dari aslinya. "The Foundations of Social Theory". Bandung: Nusa Media.
- David, Miriam E.. (2008). *Social inequalities, gender and lifelong learning: a feminist, sociological review of work, family and education*. International Journal of Sociology and Social Policy. 2008. Vol. 28 No. 7/8: pp. 260-272.
- Driyarkara, N.. (1991). *"Pendidikan Dan Peralihan Sosio Budaya"* dalam *Driyarkara Tentang Pendidikan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Haji, H.D. Ali. (2009). *"Dari Majapahit Menuju Pondok Pesantren"*. Yogyakarta: Bagaskara.
- Hutter, Marx. (1988). *"The Changing Family: Comparative Perspectives"*. Macmillan Pub Co; 2nd edition.
- Ihromi, T.O.. (2004). *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Madjid, Nurcholish. (1997). *"Bilik-Bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan"*. Jakarta: Paramadina.
- Manurung, Butet. (2007). *"Pendidikan Pada Komunitas Orang Rimba di Kawasan Adat Bukit Duabelas Jambi"*. dalam Indratno, A. Ferry T., (Ed.), *"Kurikulum Yang Mencerdaskan: Visi 2030 Dan Pendidikan Alternatif"*, Jakarta: Kompas.
- Nasution, S.. (2001). *"Sejarah Pendidikan Indonesia"*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Parera, Frans M. (2007). *"Gerakan Pendidikan Alternatif Dalam Tafsir Pasca Mangunwijaya (1999 - 2007)"*. dalam Indratno. A. Ferry T.. (Ed.). *"Kurikulum Yang Mencerdaskan: Visi 2030 Dan Pendidikan Alternatif"*. Jakarta: Kompas.
- Radcliffe, David.(1987). *"Ki Hajar Dewantara dan Sekolah Taman Siswa"*. dalam Nat J. Colletta & Umar Kayam (pen.). *"Kebudayaan dan Pembangunan"*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sanderson, Stephen, K.. (2000). *"Makro Sosiologi: Sebuah Pendekatan Sebuah Realitas Sosial"*. Jakarta: Rajawali Press.
- Simbolon, Parakitri, T.. (1995). *"Menjadi Indonesia"*. Jakarta: Kompas.
- Soetjipto, Ani, *at.al..* (2009). *"Kerja Untuk Rakyat: Buku Panduan Anggota Legislatif."* Jakarta: Puskapol. The Asia Foundation dan Norwegian Embassy.
- Supriyoko. (2003). *"Pentingnya Roh Pendidikan"*. (Opini). Jakarta: Kompas. edisi: 19 Maret 2003.
- Veeger, K.J.. (1985). *"Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individu-Masyarakat Dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi"*. Jakarta: Gramedia.

Referensi Non Buku

- Laporan Tahunan Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Tahun 2009.
- Majalah Mira, Jakarta: edisi: Nomor: 001.0/25.01.0/-2005.
- Majalah Tempo, Jakarta: edisi: 20 - 26 Agustus 2012.
- Majalah Intisari, Jakarta: edisi: November 2012.
- Kompas, Jakarta: 28 Februari 1998.
- Republika, Jakarta: 31 Desember 2013.
- <http://www.Suara.pembaruan.com/eko-nomidanbisnis/>, diunduh pada Sabtu, tanggal 28 Desember 2013, pukul: 11.25 Wib.
- Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 1991
- Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 1994

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 1997.

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2002-2003.

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2007.

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2012.

Seri I No.6/Pusdu-BKKBN/Desember 2011.

<http://www.jabarprov.go.id/index.php/subMenu/informasi/artikel/detailartikel/67>, diunduh pada Selasa, tanggal 10 Desember 2013, pukul: 09.20 wib.

<http://www.indonesiamedia.com/2013/04/05/aspirasi-perempuan-indonesia/>, Selasa, tanggal 10 Desember 2013, pukul: 09.35 wib.

<http://komisiixnews.com/2013/03/sampai-maret-2013-jumlah-rumah-sakit-mencapai-2-083-buah/> diunduh pada Minggu, 12 Januari 2014, pukul: 80.30 wib.

<http://www.depkes.go.id/index.php?vw=2&id=2251>, diunduh pada Minggu, 12 Januari 2014, pukul: 08.50 wib.

<http://www.investor.co.id/home/wamenkes-indonesia-kekurangan-12371-dokter/57605>, diunduh pada Minggu, 12 Januari 2014, pukul: 09.40 wib.

